**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A.Organisasi**

Beberapa pengertian mengenai organisasi menurut para pakar, diantaranya dikemukakan oleh **Hasibuan** dalam bukunya **Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah (2007:120)**, yaitu sebagai berikut:

**Organisasi adalah suatu sistem perserikatan, formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.**

Menurut **Milles** yang dikutip oleh**Gomes** dalam bukunya **Manajemen Sumber Daya Manusia(2003:23)** memberikan definisi organisasi sebagai berikut:

**Organisasi tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul bersama disekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa-jasa yang dapat dipasarkan**

**B. Administrasi**

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata *administration* yang infinitifnya ialah *to administer*. Dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictonary of Curent English*, kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakan). Berdasarkan uraian diatas, maka secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Berkaitan dengan hal itu, menurut **Siagian** dalam buku **Filsafat Administrasi (1997:3)** pengertian Administrasi adalah:

**Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya**.

Sedangkan pengertian dari administrasi menurut **The Liang Gie** yang dikutip **Syafiie** dalam buku **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) (2003:4)** secara sederhana mengandung pengertian bahwa :

**Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.**

Sedangkan menurut **Atmosudirdjo** dalam buku **Administrasi dan Managemen Umum (1982:39-40)**

**Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.**

Negara sebagai objek material administrasi negara, berkaitan dengan hal itu maka pengertian negara menurut **Sumantri** yang dikutip oleh **Syafiie** dalam buku **Ilmu Administrasi Publik (2006:20)**

**Negara adalah suatu organisasi kekuasan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya.**

**C. Administrasi Negara**

Selanjutnya definisi Administrasi Negara menurut **J.M Pfiffner** dan **Robert V Presthus** yang dikutip oleh **Handayaningrat** dalam buku **Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen (1981: 3)**:

**Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Negara.**

Sedangkan menurut **Hadari** dan **Nawawi** dalam buku **Ilmu Administrasi(1994)** ialah:

**Administrasi negara adalah usaha mengendalikan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber – sumber daya manusia dan alami, untuk mencapai tujuan tujuan kemasyarakatan.**

**D.Implementasi Kebijakan**

**1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Definisi **implementasi kebijakan** menurut **Woodrow Wilson** yang dikutip oleh **Riant Nugroho (2014:218)** sebagai berikut :

**Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai ujuannya, karena struktur hirarki atau kita mungkin menyebutnya sebagai perspektif pelaksana.**

Selain itu Implementasi Kebijakan menurut **Robert Nakamura** dan **Frank Smallwood (2003:17)** sebagai berikut:

**Implementasi Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus**.

Sehubungan dengan berbagai definisi mengenai Implementasi Kebijakan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan sebuah tindakan atau kegiatan mengedepankan rencana – rencana yang akan dilaksanakan demi khalayak umum.

**2.Konsep Dasar Implementasi Kebijakan**

Terdapat banyak konsep pada studi implementasi kebijakan yang dipilih. Dunn (Darwin;2000:56) menyebut terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Dari sudut padang ilmu administrasi negara, pada awalnya implementasi hanya dilihat semata - mata pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien saja. Namun menjelang akhir PD II, pandangan ini makin tidak popular. Sedangkan dari sudut pandang ilmu politik ternyata tidak sebatas itu, ia jauh menjangkau sampai ketentuan kebijakan administratif dan legislatif yang baru, perubahan – perubahan referensi publik dan teknologi baru.

**3. Maksud, Tujuan dan Fungsi Implementasi Kebijakan**

Menurut **Patton** dan **Sawicki** menyatakan bahwa **(2003:9)**menyatakan bahwa:

**Implementasi Kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.**

Jadi maksud implementasi kebijakan bukanlah mencari kesalahan cara dan pembuatnya akan tetapi lebih tepat bila dikatakan bahwa maksud nya adalah mencari kebenaran dan tanggung jawab terhadap penetapan sistem yang diberlakukan tersebut. Kemudian juga menjelaskan perihal tujuan dari kegiatan pengawasan adalah :

**Implementasi Kebijakan bertujuan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.**

Fungsi dan tugas Implementasi Kebijakan Menurut Handayaningrat **Pengantar Studi Administrasi Negara dan Manajemen(1985:143)** menyatakan bahwa:

1. **Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.**
2. **Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan prosedur yng telah ditentukan.**
3. **Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.**

**E. Pemberdayaan Masyarakat**

Peneliti akan mengemukakan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut **Wrihatnolo (2007:1)**:

**Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara needs and resaurces melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun.**

**F.Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Pemberdayaan Masyarakat**

Keterkaitan antara Implementasi Kebijakan dengan Pemberdayaan memiliki hubungan yang erat,yakni mempengaruhi terhadap warga yang mengalami dampak dari kebijakan yang dibuat oleh para pejabat,kemudian serangkaian usaha yang di lakukan secara sadar dan terencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan guna mempercepat modernisasi kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhir bangsa tersebut.Permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia yang sejak lama dirasakan sulit untuk diatasi salah satunya adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti program – program yang digerakan pemerintah untuk menunjang karir dan aktivitas warga sehari – hari.

Menurut **Woodroow Wilson**yang dikutip oleh **Riant Nugroho(2014:218)** mengenai Implementasi Kerja:

**Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai ujuannya, karena struktur hirarki atau kita mungkin menyebutnya sebagai perspektif pelaksana.**

**Wrihatnolo (2007:1)** memberikan pendapat tentang Pemberdayaan Masyarakat:

**Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara needs and resaurces melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun.**

Maka dari itu hubungan implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat dapat diketahui melalui sikap pegawai terhadap warga yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, hal ini akan mendorong semangat dan gairah kerja pegawai sehingga akan berdampak terhadap hasil kerja yang dicapai oleh para pegawai.